

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang giat dalam melaksanakan program pembangunan di berbagai sektor. Berbagai upaya dan strategi diterapkan dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Geografi serta sumber daya alam yang berbeda-beda di 34 Provinsi tentu bukan hal yang mudah untuk mengatur dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara dinamis untuk menjadi lebih baik. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan sejumlah indikator, termasuk diantaranya adalah dana operasional yang berasal dari anggaran pendapatan daerah setiap tahun. Berlandaskan otonomi daerah, pendapatan yang diterima daerah akan digunakan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pertimbangan mengenai kepentingan dan kebutuhan setiap daerah diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Implementasi sistem desentralisasi di Indonesia membuat setiap daerah memiliki wewenang untuk membuat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka mengatur kepentingannya sendiri.

Daerah kabupaten dan kota menjadi fokus utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Diawali dengan penugasan beberapa wewenang kepada pemerintah daerah terkait oleh pemerintah pusat (Setiawan et al., 2021). Pelaksanaan pembangunan daerah ditunjang dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kuasa, kewenangan, dan keharusan daerah otonom dalam mengelola urusan pemerintahan dan keperluan publik secara individu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya regulasi otonomi daerah memberikan kesempatan daerah untuk dapat memanfaatkan serta mengoptimalkan potensi beserta sumber daya yang ada, sehingga mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan dan tingkat perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat guna meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator umum yang berguna dalam mengukur kemajuan atau pertambahan perekonomian sebuah negara atau wilayah (Sirait, 2019). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai sebuah kegiatan perbaikan keadaan agar menjadi lebih baik. Pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat ditinjau melalui perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dengan tidak memperhitungkan kepemilikan faktor produksinya, baik dimiliki oleh penduduk wilayah itu sendiri maupun wilayah lain (Sukirno, 2015). Dengan kata lain, PDRB yang meningkat menunjukkan bahwa perekonomian suatu daerah sedang berkembang.

Ketika menjalankan fungsi dan wewenangnya, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. PAD yang menjadi sumber utama dalam pembangunan daerah merupakan suatu sumber pendapatan dan juga cerminan bagaimana suatu daerah mampu menggali potensi yang ada sehingga mampu menghasilkan manfaat.

Tugas penting pemerintah daerah adalah mengeksplorasi dan memperluas sumber-sumber penerimaan daerah yang ada agar dapat berhasil dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemerintah, termasuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus atau positif kemungkinan akan mempengaruhi tingkat kenaikan PAD (Susanti et al., 2017). Dari perkiraan ini seharusnya pemerintah daerah lebih fokus dan berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara optimalisasi PAD sebagai jembatan dalam penyelenggaraan kegiatan

pemerintah daerah, dengan kata lain semakin banyak kebutuhan yang dibiayai melalui PAD akan berdampak pada kualitas otonomi daerah itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang merupakan daerah yang terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumbernya untuk pembangunan daerah. Sumber daya yang ada dimasing-masing daerah di Jawa Timur berusaha dioptimalkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat penting karena kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjadikan masyarakat lebih baik dan sejahtera tercermin dari pertumbuhan ekonominya. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah tentu memerlukan waktu dalam mencapai perubahan yang lebih baik secara bertahap. Kekuatan serta kemampuan yang juga dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri, harus diselaraskan dengan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang modern bukan tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur akan mengalami perubahan yang lebih baik setiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten/Kota Jawa Timur mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020 yang kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021, hal ini ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, 2017-2021 (persen)

Terlihat pada Gambar 1.1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun (2022) Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. Persentase PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan harga konstan 2010 tahun 2017 menunjukkan angka 5,73%, kemudian tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi konstan di angka 5,60%. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,08% menjadi 5,52%, hal ini bisa dikatakan laju pertumbuhan masih cenderung stabil. Pada tahun 2020 semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan yang tajam diangka -3,41%. Penurunan ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya di 2019. Penyebab terjadinya kontraksi pada tahun 2020 tersebut akibat penurunannya produksi di setiap daerah. Seiring waktu berjalan masing-masing daerah menyesuaikan diri dalam langkah pemulihan ekonomi yang membuat angka pertumbuhan mengalami kenaikan kembali, terbukti pada tahun 2021 semua Kabupaten/Kota mengalami peningkatan hingga menunjukkan presentase 3,30%. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa upaya pemerintah dalam merespons penurunan pertumbuhan ekonomi sangat penting melalui kebijakan yang tepat.

Tercatat pada tahun 2020 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memperoleh pertumbuhan ekonomi negatif dengan angka yang berbeda-beda. Pada tahun tersebut, sektor perdagangan besar, eceran, serta reparasi mobil dan motor, serta sektor penyediaan akomodasi dan makanan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur semuanya mengalami penurunan, meskipun jenis lapangan usaha yang mengalami kontraksi berbeda-beda. Namun, pada tahun 2021, kedua sektor tersebut mengalami peningkatan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Covid-19 yang muncul diawal 2020 membuat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan prioritas untuk pelaksanaan kegiatannya. Keadaan yang membuat pemerintah Kabupaten/Kota lebih memfokuskan ke bidang kesehatan untuk penanganan virus ini harus dilakukan. Banyaknya kegiatan usaha yang ditutup sementara membuat ekonomi tersendat, sehingga

berdampak juga pada pendapatan pemerintah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi saat Pandemi Covid-19 berpengaruh pada standar kesehatan, tingkat pendidikan, dan pengeluaran perorang yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Penerimaan daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur juga mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, dimana hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Realisasi PAD dan Kenaikan/Penurunan PAD (dalam miliar)

| No | Tahun | Realisasi PAD | Kenaikan/Penurunan PAD |
|----|-------|---------------|------------------------|
| 1 | 2017 | Rp 18.197,89 | Rp 11.522,51 |
| 2 | 2018 | Rp 15.040,05 | (Rp 3.157,84) |
| 3 | 2019 | Rp 20.017,56 | Rp 4.977,51 |
| 4 | 2020 | Rp 19.091,93 | (Rp 925,63) |
| 5 | 2021 | Rp 20.954,70 | Rp 1.862,77 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PAD di Kupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp. 18.197,89 miliar menjadi Rp. 20.954,70 miliar. Selain pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan ditahun 2020 ternyata dikuti dengan penurunannya PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2020 PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan menjadi Rp.19.091,93 milyar, hal ini menandakan terjadi penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp.925,63 milyar dari tahun 2019. Ditahun selanjutnya 2021 kembali mengalami peningkatan, dimana PAD di tahun ini senilai Rp.20.954,70 milyar yang artinya mengalami peningkatan sebesar Rp.1.862,77 milyar (DJPK Kementerian Keuangan, 2022).

Sumber PAD diperoleh salah satunya dari seseorang membayar berbagai kewajibannya yang telah ditetapkan pemerintah. Pendapatan dihimpun pemerintah dari seluruh masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB memiliki pengaruh terhadap besarnya PAD (Hasanur & Putra, 2017). PDRB yang meningkat menunjukkan bahwa perekonomian suatu wilayah sedang berkembang. Perekonomian yang tumbuh

akan membawa dampak pada menambahnya penerimaan pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.

Berdasarkan uraian ini, dapat diartikan bahwa penerimaan PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep makro, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut mendapatkan penerimaan yang lebih besar. Perubahan yang terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2017-2021 yang diikuti oleh pergerakan PAD ditahun yang sama terutama pada tahun awal munculnya covid-19 yaitu dari 2020-2021 menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka judul yang diambil yaitu **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang melatarbelakangi diatas, penelitian ini membuat rumusan masalah “Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menjadi sarana penambah wawasan dan pengetahuan peneliti untuk mengetahui besar pendapatan asli daerah yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi sarana atau bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan hasil yang dapat menambah pengetahuan pembaca. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti lain untuk penelitian sejenis.